



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor : 008/Humas-KH/III/2016**

**“Mengingat (Kembali) Jokowi Untuk Prioritaskan HAM Papua”**

Tepat pada 1 Mei 1963 Indonesia mengambil alih Papua dari tangan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Sejak saat itu, kehidupan masyarakat Papua ditandai dengan tindak kekerasan bernuansa pelanggaran hak asasi manusia, minimnya akses pemulihan yang efektif, marginalisasi dan diskriminasi.

Kekerasan umumnya dilakukan aparat keamanan termasuk aparat kepolisian dan anggota militer. Peristiwa seperti itu seringkali menimpa daerah dataran tinggi yang terpencil. Di sana, aparat keamanan berulang kali menyerang warga desa dengan dalih aksi balas. Tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat adat Papua juga berakibat pada pengungsian dalam jumlah yang tidak sedikit. Tindak kekerasan juga dialami para aktivis politik karena harus mengalami kriminalisasi, penahanan dan tak jarang pembunuhan. Kondisi ini semakin memperburuk kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di tanah Papua.

Pendekatan keamanan tetap dominan di Papua. Cap sebagai separatist atau teroris kerap kali digunakan sebagai pembenaran tindak kekerasan. Pengadilan Militer dan mekanisme PROPAM di kepolisian dirasa kurang independen dan tidak memiliki kebijakan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Ketika kriminalisasi ini berlanjut, ketidaktersediaan bantuan hukum yang efektif untuk masyarakat Papua, telah memperdalam konflik sosial dan politik yang ada.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat cukup serius merespon fenomena ini. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolkumham) telah menyampaikan delapan kebijakan pokok Jokowi terhadap Papua yang harus menjadi acuan kementerian di bawah Kabinet Kerja yaitu masalah Papua harus diselesaikan melalui pendekatan pembangunan dan kesejahteraan; kekerasan di Papua diselesaikan melalui pemberian grasi dan membangun Papua tanpa konflik; mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan mempunyai kontrol terhadap prioritas; mengutamakan pelayanan publik kepada masyarakat; menjadikan Papua sebagai daerah terbuka; memprioritaskan pembangunan sistem ganda; akselerasi pembangunan infrastruktur khususnya membuka isolasi di daerah dan mencanangkan Kabupaten Merauke sebagai lumbung padi nasional; dan mengembangkan pelabuhan serta dermaga perikanan.

Sayangnya komitmen Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi persoalan HAM di bumi Papua kembali dipertanyakan. Pasalnya kendati tokoh nomor satu Indonesia ini, paling tidak dalam satu tahun belakangan, telah beberapa kali mengunjungi tanah Papua, namun kehadirannya di tengah warga Papua hanya sebatas mengurus infrastruktur pembangunan. Fokus ini telah mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat Papua akan tegaknya hak asasi manusia.

Belum lagi tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat Wamena-Wasior dan pelanggaran HAM lainnya di Papua, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap kurang lebih 700 Orang Papua. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang mengemuka dan mendapat perhatian publik baik nasional maupun internasional dalam catatan Komnas HAM, yaitu :

1. Sedikitnya 41 anak meninggal secara misterius di Kabupaten Nduga (November 2015);
2. Kematian empat siswa dan 17 anak (Desember 2014);
3. Penembakan di Kabupaten Yahukimo (Maret 2015);
4. Penembakan di Kabupaten Dogiyai (Juni 2015);
5. Penembakan di Kabupaten Tolikara (Juli 2015);
6. Penembakan di Kabupaten Timika (Agustus 2015);
7. Penangkapan sedikitnya 500 orang terjadi di bawah masa kepemimpinan Presiden Jokowi;

8. Kasus saham PT Freeport Indonesia, proyek MIFE di Merauke dan berbagai proyek pembangunan yang mengabaikan masalah sosial warga adat; dan
9. Di Pemerintahan saat ini ada indikasi kuat terjadinya pemberangusan terhadap institusi adat rakyat Papua yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia khususnya bidang kebudayaan.

Kondisi ini masih harus ditambah dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Pada 15 November 2015 lalu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membuka dan meresmikan sebuah kantornya di Wamena, Papua. Kantor ini merupakan sebuah honai yang dibangun dari solidaritas masyarakat Papua. Honai ini juga menjadi kantor Dewan Adat Papua Lapago.

Acara peresmian kantor ULMWP itu berlangsung terbuka dan dihadiri oleh ribuan masyarakat Papua. Namun, sehari sesudah acara peresmian, aparat keamanan dari Polres Jayawijaya melakukan tindakan mencabut plang atau papan nama ULMWP. Kemudian, Polres Jayawijaya melakukan pemeriksaan beberapa orang yang menjadi koordinator dan berperan dalam acara tersebut.

Ada sekitar tujuh saksi yang dipanggil untuk diperiksa. Empat orang sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, yaitu Englebert Surabut, Bonivasius Mulait, Pieter Wanimbo, dan Pastor John Djonga. Saat ini proses hukum sedang berjalan. Saksi-saksi diperiksa terkait dengan pidana Makar.

Pastor John Djonga, dan beberapa pekerja kemanusiaan lainnya, yang diperiksa dalam kasus tersebut adalah contoh terbaru bagaimana rentannya perlindungan hukum bagi pekerja kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kasus pidana makar kembali digunakan untuk mengkriminalisasikan para pekerja dan pembela hak asasi manusia.

Dalam rangka mengingatkan (kembali) Pemerintahan Jokowi untuk memprioritaskan masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan di tanah Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI dan Honai Center menggelar diskusi publik dengan judul "**Jokowi, Kenapa (Tak) Urus HAM Papua?**".

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang dialog, memberikan informasi dan *update* tentang situasi dan perkembangan proses-proses hukum yang mengancam para pekerja kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia di Papua, memperkuat gerakan kemanusiaan dan perdamaian bagi Papua, dan menciptakan peluang-peluang penyelesaian konflik dan kekerasan secara bermartabat (menghormati hak asasi manusia).

Narasumber yang akan terlibat adalah Luhut B. Panjaitan (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan), Nur Kholis (Ketua Komnas HAM), Siti Noor Laila (Pelapor Khusus Komnas HAM untuk Isu Pembela HAM), Dr. Budi Hernawan (Peneliti Elsam), Abdurrahman Wahid (Center UI), Markus Haluk (Anggota Tim Kerja ULMWP di Papua), dan Marinus Young (Pengamat Hukum Universitas Cenderawasih-Jayapura).

Acara ini dihadiri oleh stakeholder terkait yaitu para pimpinan organisasi mahasiswa Papua, organisasi non-pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan kedutaan besar di Jakarta, aktivis kemanusiaan dan hak asasi manusia, akademisi, dan jurnalis. Kegiatan dilangsungkan di Gedung Komnas HAM Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Maret 2016 pukul 14.00 WIB.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 4 Maret 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan,**



**Natalius Pigai**